

## BAB IV

### PRAKTIK DASAR KEKUKUSAAN POLITIK NAHDLATUL ULAMA

#### A. Dasar-dasar Poitik NU

Memahami politik sebagai sesuatu yang juga memiliki dimensi normatif Definisi umum agama, bukan politik materialistis, harus ditafsirkan demikian manusia mengejar kesempurnaan atau perjalanan menuju keuntungan. Atau dari bahasa Aristoteles mengajarkan kita untuk bertindak dengan tepat dan hidup bahagia. Dengan Dalam pengertian ini, politik memiliki nilai luhur, sakral dan jelas tidak kontradiktif Agama Setiap orang beragama harus berpolitik. Oleh karena itu politik adalah sesuatu yang khas dari manusia. Menurut teori Islam dalam mekanisme kerja penyelenggaraan Negara Referensi harus dibuat untuk prinsip-prinsip Syariah. Islam sebagai dasar etika dan moralitas diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pokok-pokok pikiran yang berkembang dalam wacana pemikiran politik Islam, Setiap kelompok pemikiran Islam dapat dibagi menjadi tiga tipologi. Yang pertama adalah kelompok yang membedakan agama di atas negara dan Negara memandang hubungan antara agama dan negara sebagai suatu integralistik. Pandangan ini memandang agama sebagai institusi yang sempurna untuk mengatur kehidupan kebijakan sosial yang manusiawi, sehingga pendekatan lain tidak lagi diperlukan.

Model ini jejaknya bisa ditemukan pada pemikir Islam terkemuka seperti Almaududi, Natsir yang melihat peluang untuk menegosiasikan urusan eksternal sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Islam. Kelompok ini toleran dan melihat sedikit pembenaran untuk urusan luar, seperti demokrasi, hak asasi manusia dan isu-isu lain yang dapat dipertimbangkan. Hubungan antara agama dan negara berada dalam keadaan yang berbeda. Menurut penjelasan di atas, dan argumen yang disajikan, tentu saja memiliki segmen diskusi yang cukup kuat pada subjek tersebut bagaimana sekularisme harus dikaitkan dengan universalisme agama atau pesan-pesan normatif agama Islam yang terkandung dalam Alquran -sunnah.

Topik utama sosiologi agama adalah peran agama dalam masyarakat. Sosiologi agama sebagai cabang sosiologi biasanya berurusan dengan agama pendekatan sosiologis karena itu tidak memiliki otoritas untuk membuktikan dirinya benar tidak religius Agama tidak dilihat dari segi ajarannya Kebenaran itu mutlak, tetapi dalam lembaga-lembaga keagamaan perilaku sosial menjadi persoalan Pengikut dan apa yang dapat dilakukan agama untuk meningkatkan kualitas kehidupan rakyat<sup>38</sup>. Agama diperlukan sebagai sistem kepercayaan, sebagai sistem makna yang muncul dan diwujudkan dalam kehidupan sosial melalui interaksi yang merespon situasi yang dihadapi oleh pendukungnya.

Agama membantu kewajiban sosial melalui penetapan nilai yang menyalurkan sikap masyarakat yang menentukan isi kewajiban sosial mereka. Agama dapat membantu menciptakan sistem nilai-nilai sosial yang integral dan tidak terpengaruh. Di sisi lain, agama bisa menjadi negatif jika interpretasinya tumpang tindih dengan ajaran doktrin atau sistem agama yang lain, terutama dalam masyarakat<sup>39</sup>.

Tetapi ketika kita berbicara tentang Islam, termasuk politik Islam itu juga harus mempertimbangkan dan berhubungan dengan berbagai masalah. Perhatian dan referensi ini mengacu pada hakikat konsep kehidupan Islam, juga dalam istilah sosial secara politis Itu juga lahir sebagai agama yang tidak memisahkan kehidupan spiritual dan fisik akal, dunia dan akhirat, maka Islam menganjurkan terciptanya kebiasaan kebiasaan tertentu, diantaranya sistem secara umum. Metode dan sistem ini banyak diterapkan oleh Nabi Muhammad SAW yang bagus dan patut dijadikan panutan bagi umat Islam. Ada cara dan sistem dengan nilai-nilai Islam. Muhammad Said memberikan dasar-dasar kebijakan pemerintah dalam Syariah. Dengan keagungan syariat Islam yang mencontohkan prinsip dan nilai luhur, sehingga masyarakat abad pertengahan mengalami kemegahannya. Menurutnya, kebebasan beragama merupakan prinsip syariah kebebasan manusia, penghormatan terhadap wanita dan prinsip-prinsip luhur lain Karena itu, lanjutnya, mencoba mengenalkan syariah berarti mengambil metode kebijakannya

---

<sup>38</sup> Abdul Aziz Thaba, *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru*, Gema Insani Press, Jakarta, 1996, h. 32

<sup>39</sup> *Ibid*, h. 35

dalam memimpin umat manusia menuju kesucian yang lebih tinggi, dan kemajuan umat manusia menuju martabat yang lebih terhormat. katanya lagi Sistem pemerintahan Islam yang sejati adalah sistem yang diturunkan dari realitas dan kehendak generasi mereka, dan itu didasarkan pada partisipasi masing-masing individu semua fungsi pemerintahan, legislasi dan pengawasan.

NU selalu melakukannya mengikuti perkembangan dan kemajuan dunia dan kemudian menyetujui aturan mulia dalam hal politik dan aturan dan dasar-dasar sistem pelatihan dan pengajaran. Itu juga berbentuk sistem pemerintahan universal yang paling mirip dengan kondisi lingkungannya, Dalam Masalah sosial dan nilai-nilai sebenarnya. Ia melanjutkan sistem pemerintahan atau basis politik pemerintahan Islam sebuah sistem yang menghormati orang dan tidak menempel pada teks. Dia sangat khawatir kemanusiaan dan tidak dipandu oleh pendapat. Tapi sistemnya Pemerintahan Islam adalah sebuah sistem yang bekerja demi kehormatan jalanan kebenaran, keadilan, dan keteguhan dalam diri setiap individu. Ini adalah cara metode dan sarana.

NU percaya bahwa itu adalah inti dari keberadaan, kehidupan dan alam semesta. Oleh karena itu, nilai-nilai kebenaran, keadilan, kejujuran, kehandalan, tanggung jawab, dengan kata lain tindakan, sikap istiqomah (konsisten), dll. Misalnya, semua nilai ini dapat ditanamkan dan dikendalikan dengan lebih baik, setia pada doktrin, kesepakatan, sikap dan tindakan, terutama tentang hidup berdampingan dengan masyarakat dan negara, dibuat secara terbuka. Masalah sosial dan nilai sebenarnya melanjutkan sistem pemerintahan atau basis politik pemerintahan Islam sebuah sistem yang menghormati orang dan tidak menempel pada teks. Dia sangat khawatir kemanusiaan dan tidak dipandu oleh pendapat. mensyaratkan pengaturan kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yang juga sesuai dengan nilai-nilai tersebut. Misalnya, semua nilai ini dapat disimpan dan dipantau dengan tepat Pelajaran ketika perintah, sikap dan tindakan sangat relevan Hidup bersama dengan masyarakat dan negara terjadi secara terbuka.

## **B. Praktik dasar politik NU dari generasi ke generasi**

Pada masa kolonial belanda

Untuk saat ini, NU lebih bersifat wait and see dan Memantau situasi politik nasional dan berpartisipasi Dalam pernyataan politik, NU membuat pernyataan atas nama pemerintah Belanda. Sementara itu, kongres tahunan lebih diwarnai dengan diskusi pada masalah agama.<sup>40</sup> Namun, itu tidak bermakna NU tidak memiliki sikap yang tegas terhadap kekuasaan kolonial. Kuatnya sikap ini baru terlihat ketika Belanda turun tangan mata pelajaran agama. Misalnya, NU melakukan protes pada tahun 1931 kebijakan yang mencabut otoritas pengadilan agama atas warisan yang kemudian mengesahkan hukum adat.<sup>41</sup> Selain itu, NU secara tegas menentang undang-undang perkawinan yang diusulkan dan meminta agar pemimpin diangkat dengan bijaksana ulama setempat karena mereka dapat menguji keterampilan dan kualitas orang untuk posisi administrator.<sup>42</sup> Pada tahun 1936 di Mukhtar, Banjarmasin, NU memutuskan bahwa Indonesia adalah Dar al-Islam (negara).<sup>43</sup> Menurut persepsi, mayoritas penduduk di negeri ini beragama Islam dan wilayah ini pernah diperintah oleh raja-raja Muslim. Ketidakpuasan terhadap NU dan ormas Islam lainnya Muncul keinginan menentang kebijakan kolonial Belanda Membentuk front bersama untuk meningkatkan komunikasi dan negosiasi reguler. Kesepakatan ini akhirnya melahirkan Federasi MIAI (Dewan Islam Indonesia).<sup>44</sup>

Pada masa kolonial Jepang.

Pada bulan Maret 1942, ketika Dai Nippon menggantikan kepemimpinan Belanda. Pertama kedatangan Semua orang Indonesia menyambut Jepang.<sup>45</sup> Memang Kedekatan ini segera berubah menjadi kebencian saat ditemukan bahwa Jepang tidak lebih baik dari koloni Belanda. Jepang jauh lebih kejam, lebih kejam dan tidak segan-segan menghukum orang yang dianggap tidak bersalah Hubungan

---

<sup>40</sup> 5Martin Van Bruinessen, *NU: Tradisi, Relasi-relasi Kuasa dan Pencarian Wacana Baru* (Yogyakarta: LKiS, 1994),h. 47.

<sup>41</sup> Andree Feillard, *NU vis a vis Negara: Pencarian Bentuk, Isi dan Makna, terj. Lesmana* (Yogyakarta: LKiS, 1999),h.16

<sup>42</sup> 7M. Ali Haidar, *Nahdlatul Ulama dan Islam: Pendekatan Fiqh dalam Politik*, (Jakarta: Gramedia, 1994), h.94-95.

<sup>43</sup> 8M. Aziz Masyhuri, *Masalah Keagamaan: Hasil Mukhtar dan Munas Ulama Nahdlatul Ulama* (Surabaya: PP Rabithah Ma'hadil Islamiyah, 1977), 138

<sup>44</sup> Anam, *Pertumbuhan*, h.102.

<sup>45</sup> Harry J. Benda, *Bulan Sabit dan Matahari Terbit: Islam Indonesia Pada Masa Pendudukan Jepang, Alih bahasa Daniel Dhakidae* (Jakarta: Pustaka Jaya, 1980),h.135

dengan Jepang mengalami benturan ketika Jepang Meminta orang-orang dari Indonesia untuk membuat seikeirei.

Sebuah acara ritual dalam bentuk membungkuk kepada Kaisar Tenno Haika, yang seharusnya adalah keturunan dewi matahari, di pagi hari. Ritual ini diperjuangkan umat Islam karena dianggap bertentangan dengan ajaran tauhid. Di mana-mana ada protes terhadap ketidaksopanan ini. Karena itu, KH Hasyim Asy'ari sendiri divonis empat bulan penjara penjara pemerintah Jepang. Dia dituduh sebagai dalang Kerusuhan di pabrik gula Jombang. Membuat alasan Jepang, alasan sebenarnya adalah dia menyangkal Seikirei.<sup>46</sup>

Kasus ini mendapat tentangan yang kuat Dari pejabat NU dikirim ke Jepang.<sup>47</sup> Jepang menanggapi protes itu dengan serius karena Kekhawatiran merebak, Kyai Hasyim dibebaskan 18 Agustus 1942. Pemerintah Jepang 10 Pada September 1943, NU dan Muhammadiyah resmi diakui serta memberikan ruang lingkup untuk tindakan yang terjadi setelah jam 3 sore Juli 1942 melarang semua gerakan sosial dan politik. Nanti Itu sebabnya Jepang mendirikan Pembela Tanah Jawa (PETA) Omemiliki pemimpin nasionalis sekuler berpartisipasi dalam arena politik untuk mencapai keseimbangan di antara orang Indonesia dan menarik sebanyak itu mungkin dukungan untuk Jepang.<sup>48</sup>

Pada masa kemerdekaan.

Kasus menjatuhkan bom atom Di Amerika Serikat di Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945 adalah peristiwa paling bersejarah. keadaan ini, mampu mengubah dan memerintahkan perang dengan menyerah Dai Nippon kepada Sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945.<sup>49</sup> Meskipun demikian Namun, bukan berarti pendudukan Jepang di Nusantara segera berakhir. Kontak bersenjata

<sup>46</sup> Lihat Lathiful Khuluq, *Fajar Kebangunan Ulama: Biografi K.H. Hasyim Asy'ari* (Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara, 2000), h.96.

<sup>47</sup> Anam, *Pertumbuhan*, h.119.

<sup>48</sup> Khuluq, *Fajar*, h.99.

<sup>49</sup> Sutopo Jasamihardja dkk.h. 19 Desember 1948, *Perang Gerilya Perang Rakyat Semesta* (Jakarta: Media Aksara Grafia, 1998),h.13

antara tentara Jepang dan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sering tampil.<sup>50</sup>

Namun yang lebih berbahaya dan menjadi ancaman yang paling nyata Kembali dari Belanda ke Jakarta pada tanggal 29 September 1945 yang ingin berkendara dengan sekutu, mungkin ingin melanjutkan Kembali ke kolonialisme di Indonesia, meningkatkan kesadaran di kalangan penduduk Indonesia Kemandirian bukanlah hadiah, Anda harus berjuang untuk itu Ketika pengurus NU melihat tanda-tanda itu, mereka menelepon cabangnya di seluruh Jawa dan Madura untuk menentukan posisinya Melawan kehadiran Belanda. 21-22 Oktober 1945 Pertemuan para konsul tersebut berlangsung di halaman kantor yang dikelola PBNU langsung ke K.H. Chaim Ashari. Akhirnya dikabulkan Resolusi, yang isinya dikonsultasikan oleh Pemerintah Republik Indonesia harus segera mengambil tindakan tegas terhadap Belanda berjuang mempertahankan kemerdekaan. Pengaruh solusi ini terhadap Jihad sangat kuat. Ingat pesannya Ini termasuk pertempuran melawan Belanda Tugas.<sup>51</sup>

Pada akhirnya bergema keras di mana-mana Jawa dan Madura, khususnya Surabaya, melawan semangat jihad Pasukan sekutu dan NICA terbakar di mana-mana. rumah-rumah kecil para petani menjadi markas Hizbullah dan Sabilillah.<sup>52</sup> Lebih tepatnya, dua minggu setelah kedatangan Inggris di Surabaya Pada tanggal 10 November 1945 pecah Perang Besar,<sup>53</sup> pertempuran yang terjadi dalam 15 hari itu pendukung NU yang berpartisipasi aktif Sejatinya, posisi Kyai NU tidak hanya terbatas penggerak dan pelaku perang suci, tapi posisinya pemimpin spiritual diyakini memiliki manfaat berupa kekuatan untuk memberkati orang dan membuat mereka kebal Peluru dan Senjata Pematong.<sup>54</sup>

---

<sup>50</sup> Kuntowijoyo (ed.), *Sejarah Perjuangan HizbullahSabilillah Divisi Sunan Bonang* (Surakarta: Yayasan Bakti Utama,h.19

<sup>51</sup>Anam, *Pertumbuhan*,h.130.

<sup>52</sup> Martin Van Bruinessen, *NU: Tradisi, Relasi-relasi Kuasa dan Pencarian Wacana Baru* (Yogyakarta: LKiS, 1994),h.60

<sup>53</sup> Jasamihardja dkk., *19 Desember 1948*,h.43.

<sup>54</sup> Anam, *Pertumbuhan*,h.131.

Pasca kemerdekaan.

Setelah kemerdekaan, NU bertujuan untuk masuk kancah politik disalurkan melalui Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi), yang didirikan beberapa bulan setelah deklarasi Kemerdekaan. Khususnya pada bulan November 1945 sebagai akibatnya Kesimpulan Konferensi Islam Indonesia di Yogyakarta 7-8. Keputusan ini menegaskan bahwa Masyumi adalah satu-satunya pihak Untuk umat Islam Indonesia.<sup>55</sup> Keterlibatan NU dalam Masyum Tak lama kemudian, pada 15 April 1952, NU memutuskan keluar Masyum dan mengaku sebagai partai politik. Wahid Hasyim, Presiden PBNU saat itu melihat organisasi tersebut Kepemimpinan semakin condong ke arena politik. Tokoh-tokoh muda seperti Idham Chalid, Saifuddin Zuhri, Ahmad Syaichu dan lainnya yang semakin mengembangkan sayap di bidang politik.

Masa orde baru.

Secara historis, agama telah memainkan peran peran yang sangat besar dalam memajukan kegiatan sosial dan Politik untuk melawan kekuatan politik dan ideologi Negara sangat dominan. Banyak gerakan terjadi selama masa kolonial berdasarkan agama dan mengarah pada penyangkalannya hegemoni negara dan kondisi sosial politik meskipun gerakan ini sebagian besar tidak terorganisir bagus dan tidak sistematis, tapi maknanya apa adanya pertentangan sosial umat beragama (dalam hal ini masyarakat petani) tidak dapat diabaikan begitu saja. gerakan-gerakan itu menunjukkan kemampuannya untuk melawan ideologi dominan dan praktik pemerintah<sup>56</sup>

Masa reformasi.

Tekanan dari sistem Orde Baru terhadap aktivis Muslim tampaknya mendapatkan momentum meledak pada era Reformasi. Bersamaan dengan penghapusan prinsip tunggal Pancasila, semangat ini menemukan katarsis untuk mewujudkannya dalam bentuk partai politik.<sup>57</sup> Bahkan, Partai Persatuan

<sup>55</sup> Deliar Noer, *Partai Islam di Pentas Nasional* (Jakarta: Pustaka Utama Graffiti, 1987),h.47.

<sup>56</sup> Muhammad AS Hikam, *Demokrasi dan Civil Society* (Jakarta: LP3ES, 1996),h.142.

<sup>57</sup> Tashwirul Afkar, *Partai-partai Islam: Transformasi Gerakan Islam dan Ruang Demokrasi* (LAKPESDAM dan LTN-NU, Edisi No. 4 Tahun 1999),h.7.

Pembangunan (PPP), salah satu partai warisan Orde Baru Pancasila dimodifikasi untuk didasarkan pada prinsip-prinsip Islam.

Tekad melakukan khittah NU untuk menjaga jarak Politik dan kekuasaan seakan hilang, tradisi politik berakar pada warga NU, khususnya di yang elit, sulit untuk memperlambat. Abdurrahman Wahid, sebagai protagonis dari gerakan kembali ke Khittah sebelum 1926, kemudian tergoda mendirikan partai politik, yang kemudian disebut Partai Kebangkitan Nasional (PKB). Meski NU menyatakan diri merdeka organisasi sosial yang melampaui politik praktis, dan Keputusan Mukhtamar ke-27 Istiqamah Situbondo Khittah 1926.<sup>58</sup> Namun lahirnya PKB langsung berdasarkan Rekomendasi PBNU memberi sinyal kuat keinginan NU berpartisipasi dalam mengarungi atau setidaknya memiliki perahu samudra politik Indonesia yang saat ini sedang naik daun.<sup>59</sup> Juga Pembentukan PKB melalui proses persiapan yang dibuat oleh kelompok beranggotakan lima orang,<sup>60</sup>

Dukungan PBNU terhadap PKB tidak sia-sia, kata partai tersebut Tercatat, partai menjadi penyalur utama aspirasi warga NU.<sup>61</sup> Di tingkat nasional, perolehan suara PKB termasuk lima besar pemenang Suara, mengalahkan suara partai-partai yang berbasis kekuatan Islam lainnya seperti PPP, PAN dan PKS. Keberhasilan ini wajar Mengingat mesin politik PKB dikendalikan oleh Kyai NU "kerajaan kecil" seperti pesantren memiliki keramaian loyalitas budaya siswa, komunitas petani, pendukung, dll pendukungnya.<sup>62</sup>

Meskipun dukungan PBNU terpusat PKB tidak menjamin pasukan NU otomatis masuk partai. Sebagian suara Nahdliyin tidak tersebar di banyak tempat dari partai lain seperti Golkar, PDI-P, PPP dan partai politik lainnya PBNU sebagai pengurus ormas NU tidak wajib secara tertulis tentang afiliasi rakyatnya

<sup>58</sup> Tentang hubungan NU dan PKB dapat dilihat dalam, *Menyambut Deklarasi PKB* (DPP PKB, 1998),h.26.

<sup>59</sup> Asmawi, PKB, *Jendela Politik Gus Dur* (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1999),h.2

<sup>60</sup> Hairus Salim, Uzair Fauzan dan Umar Ibnu Sholeh (ed.), *Tujuh Mesin Pendulang Suara: Perkenalan, Prediksi, Harapan Pemilu 1999* (Yogyakarta: LKiS dan CH-PPS, 1999),h.231

<sup>61</sup> NU sebagai organisasi masyarakat Islam terbesar di Indonesia, setidaknya melahirkan empat partai politik baru: Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), pimpinan Matori Abdul Jalil, Partai Kebangkitan Umat (PKU), pimpinan K.H. Yusuf Hasyim, Partai Nahdlatul Ulama (PNU) pimpinan K.H. Syukron Makmun serta partai Solidaritas Uni Nasional Indonesia (SUNI) yang didirikan Abu Hasan. Ibid.

<sup>62</sup> Faisal Ismail, *NU, Gusdurisme dan Politik Kyai* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999),h. 43.



hanya dengan satu partai pedoman khusus (PKB). Hal ini dapat dibuktikan dengan akuisisi Sementara suara PKB memiliki suara yang signifikan, ternyata tidak mencerminkan kekuatan massa NU yang sebenarnya. Memperhatikan Sebagai ormas terbesar di Indonesia, diprediksi lebih dari 32 ormas Jutaan orang suara PKB harus lebih besar suaranya, jika semua anggota NU memilih partai itu.

### **C. Gerakan politik Nahdlatul Ulama**

Belakangan ini, wajah NU berubah dalam prosesnya lari dengan kondisi politik yang mewarnai dinamika NU, baik internal maupun eksternal. Pekerjaan rekonstruksi wacana Kaum tradisionalis NU terlihat dalam wacana yang berkembang dari generasi ke generasi akhir-akhir ini bahkan menyusup ke wacana liberalism hingga post-liberalisme yang menunjukkan wajah baru NU Pemuda NU eksis di jalur budaya. Proses pengamatan dan perubahan sejarah politik, di bawah ini gerakan politik dan refleksi pemberdayaan di NU Masyarakat madani pasca Khittah 1926, berikut beberapa di antaranya alasannya adalah:

Pertama, Nahdlatul Ulama yang sudah ada sejak awal berdirinya sebuah organisasi politik keagamaan yang menyebabkan perubahan karakter Kiai penyangga utama berbasis pesantren (kiai-santri). Dalam perjalanan sejarahnya, NU telah mengalami proses perubahan mewarnai dinamika perjalanannya, di mana NU berada sejak awal Pendiri mereka yang mengaku kelompok tradisional kini disusupi di area kehidupan yang lebih terbuka daripada saat dia lahir Ulama NU terpapar wacana modern dan kekinian civitas akademika. Ini adalah fenomena baru di Finlandia organisasi keagamaan ini.

Kedua, NU juga menjadikan Kiai sebagai tokoh sentral juga mengalami banyak perubahan atau modifikasi karena kiai sendiri mulai membuka diri terhadap nilai-nilai baru. Bahkan sangat terkait dengan politik, misalnya Dalam politik praktis fenomena ini muncul, misalnya ketika NU pertemuan partai politik pada tahun 1950-an dan kemudian pada periode reformasi, Tokoh NU seperti KH. Abdurrahman Wahid, terpilih presiden keempat, KH. Kholil Bisri menjadi Wakil Presiden MPR dan Beberapa kiai aktif di PKB dan partai berbasis NU lainnya mengakibatkan beberapa Kiai menjadi anggota parlemen. Meskipun demikian,

mayoritas peneliti NU masih memilih untuk bekerja secara mandiri sepenuhnya membangun pesantren sendiri.

Ketiga, langkah progresif dan aksi atau gerakan Politik pemuda NU di jalan budaya telah menjadi fenomena menarik, terutama dalam proyek konstruksi masyarakat sipil. Kiprah pemuda NU di jalur budaya ini semakin dekat Bagian dari proses transformasi yang menunjukkan NU saat ini terus eksis di masa depan dengan merangkul pembangunan berlangsung di tempat yang berbeda. kelompok pemuda NU pada dasarnya juga dibagi menjadi dua, yaitu pengelompokan kancah politik nasional, seperti Muhaimin Iskandar, Efendi Choiri, Masykur Musa, Khofifah Indar Parawansa dan lainnya. sebuah grup yang lainnya adalah mereka yang, seperti Ulili, hidup di jalur budaya Abhsar Abdalla, Ahmad Baso, Rumadi, Zuhairi Misrawi dan lainnya memutuskan untuk berpartisipasi dalam perjalanan budaya dengan mengembangkan akal pemeriksaan kritis terhadap pemikiran keagamaan dan gerakan politik tentang penguatan masyarakat sipil.

Setiap pelaksanaan ini menunjukkannya NU mengkaji sebuah proses perubahan dari pemerintahan Kiai ke era tersebut Para ahli (intelektual) dan kemudian para pemuda peran yang kontribusinya agak diperhitungkan. proses yang luar biasa menunjukkan dinamika dan proses kreatif setiap generasi dalam menanggapi berbagai perkembangan dewasa ini, misalnya Dari tanaman Bahsul Masail. Lembaga berbasis penelitian ini intensif membahas masalah politik (fiqih siyasah) pertanyaan agama topikal (diniyyah Ḥadāyyah) mengandung masalah Nasionalisasi, demokratisasi, demokrasi, demonstrasi, hak asasi manusia, dll dana bersama Isu-isu ini biasanya dibahas dalam konferensi nasional atau konferensi yang membahas masalah-masalah keagamaan sehari-hari (diniyyah Waqiiyah), seperti sholat Jum'at dua rakaat, nikah mut'ah, nikah Individu pribadi dan anak di bawah umur, hak atas tanah, insulin, kloning, protes dan demonstrasi.

Ini menunjukkan bagaimana ulama NU cukup progresif dalam menjawab berbagai pertanyaan politik secara sosial Maka langkah kecerdasan berhasil mengangkat wajah NU di tingkat nasional dan internasional seperti yang dimainkan KH. Abdurrahman Wahid dan KH. Hasyim kepada muzadi Peran lain yang perlu diperhatikan adalah keberadaan mereka Pemuda NU dalam perjalanan

budaya terobsesi dengan pemberdayaan masyarakat sipil dalam bentuk pembelaan hak-hak pekerja dan petani miskin di desa-desa terpencil. Kemampuan NU dalam percaturan politik nasional mengambil peran dalam negara. Pada Dalam kondisi tertentu, NU sangat fleksibel dan adaptif Pemerintah (negara), tetapi dalam keadaan lain NU menjadi oposisi kebijakan politik negara (state).

Dalam hal ini titik pengamat dan peneliti asing menjadi daya tarik tersendiri di kalangan sosiolog serta pemerhati politik agama dan pemerhati asing seperti misalnya Nakamura, Andree Fillard, Greg Barton, and Martin Van Bruinessen Sydney Jones dan lainnya. Meskipun telah terjadi perubahan gerakan dalam satu dekade terakhir Kebijakan keagamaan NU masih menunjukkan nuansa dinamisme merupakan fenomena yang harus dikaji secara ilmiah. misalnya perjuangan para politisi dan kelompok intelektual akademisi serta mereka yang aktif dalam gerakan budaya atau cultural movement, masing-masing berpartisipasi dalam konteks politik dan politik negara.

Dinamika berbeda yang mewarnai perjalanan NU memang menarik Secara khusus, membaca tentang kesediaan NU menerima nilai-nilai baru melestarikan nilai-nilai lama yang masih relevan. Dalam pengertian ini penulis berasumsi demikian fenomena ini sebagai proses perubahan politik yang mendalam makna yang lebih global, yaitu perubahan politik agama, politik, budaya. Inilah yang mewarnai gerakan politik budaya dan mengubah NU sepanjang sejarah.

Kemudian periksa proses konversi Politik dalam pemikiran NU yang menjaga keterbukaan terhadap nilai-nilai modern di semua bidang kehidupan, misalnya dalam kancah kehidupan politik, budaya, agama, dan kebangsaan dan negara bagian perubahan seperti yang dijelaskan di atas khususnya di organ organisasi keagamaan NU mengkaji proses perubahan dalam gerakan politik kerakyatan pemuda NU sebagai subjek penelitian ini. perubahan dalam konteks ini Dipahami sebagai proses mengubah bentuk institusi yang pernah memproduksinya atau setidaknya memilikinya mewarnai proses perubahan dalam gerakan politik.

Prosedur Perubahan seperti itu hanya terjadi dalam beberapa kasus pada tataran strategi taktis tanpa basis massa dan ideologinya. Namun, dalam kasus yang berbeda berisi masing-masing variabel ini. Gerakan politik NU pada

awalnya membekas bersifat reaktif, dipengaruhi oleh kondisi sosial politik sisi lain dan faktor eksternal yang menyebabkan munculnya proses tersebut perubahan ini.

Oleh karena itu penulis mengkaji konteks gerakan ini menjadi objek penelitian untuk kajian gerakan politik NU adalah bahwa konversi dilakukan di beberapa Menukopi; Pertama, tumbuhnya kesadaran pemuda NU kolektif setelah kontak dengan bidang kehidupan nyata dalam masyarakat terlepas dari nuansa dan pengaruh Aura akademik bagi mereka yang melanjutkan studi. Periodisasi yang menandai perubahan ini diidentifikasi tepat setelah NU sejak awal 1980-an kembali ke Khittah 1926 dan fenomena ini terus berlanjut sampai sekarang.

Namun, lihat jangka waktunya terkait dengan proses perubahan gerakan politik pemuda NU adalah lahirnya intelektual muda NU yang dipimpin oleh KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), saat itu juga sebagai motor penggerak intelektualisme NU yang baru saja kembali dari bangku kuliah Di Timur Tengah. Kedua, perubahan gerakan politik dan budaya yang menjadi basis utama gerakan pemuda NU adalah gerakan perubahan generasi anak muda khususnya yang aktif di kampus (baca: Mahasiswa).

Basis Gerakan Anda dibangun melalui penelitian dan institusi politik kemudian LKiS lahir di Yogyakarta, Piramida Lingkari, Lakpesdam, P3M masing-masing di Jakarta dan beberapa organisasi kepemudaan NU yang secara genealogis berakar pada "ideologi" NU. Kegiatan Mereka cukup beragam, mulai dari level perbincangan, termasuk membangun Jaringan Islam Liberal (JIL). cukup fenomenal untuk menyusup ke gerakan politik bagaimana memperkuat masyarakat sipil. Tentu saja, proses perubahannya sudah jelas pergeseran paradigma dalam gerakan politik-keagamaan sekarang.

Untuk berpikir bahwa tidak hanya terjadi pada hal-hal hanya tidak senonoh, tetapi juga mempengaruhi aspek lainnya orang suci (santo) dari gerakan tersebut. Sederhananya, prosesnya Perubahan yang terjadi muncul dari visi transformatif agama inilah semangat gerakan dan sumber nilai.

#### **D. Prilaku politik Nahdlatul Ulama**

Ketika menjelaskan perilaku politik, NU harus menyimpang Peran awal NU di negeri ini terus direnungkan Deklarasi 1945 setelah perselisihan antar pihak konflik antara, misalnya, partai-partai Islam semakin memanas pendirian negara oleh kaum nasionalis sekuler. Kemudian konflik NU dengan Masyumi berakhir di fase menjadi NU Kongres NU ke-17 di Palembang tahun 1952.

Demikian pula politisi NU menuai dari Negara di PPP sampai dia memutuskan untuk kembali ke sunat pada tahun 1926. Pembahasan fitur utama yang masih belum jelas di kalangan warga NU belum selesai, tiba-tiba sistem tata tertib. Runtuh begitu saja, menimbulkan keinginan para politisi NU Kaii PKB tidak bisa dihentikan.

Sejarah NU lengkap jika dibaca secara detail Singkatnya, tidak mengherankan jika dia terkesan penuh dengan kontradiksi dan inkonsistensi dalam posisi politiknya. Di dalam Dari sudut pandang ini, Syamsul Ma'arif tampaknya benar. Tapi bukan itu lebih tepat bila dibaca sebagai dinamika daripada argumen. Lagi oleh karena itu wajar juga jika dia menetapkan harapannya untuk melihat pemandangan itu Kebijakan NU ke depan dengan berbagai tawaran yang diterima bisa mencegah kendaraan politik NU meluap dengan lawan politik.

Tapi hebatnya, NU tidak partai politik setelah Khittah agar Nahdliyin merdeka Pilih pesta yang Anda inginkan. Sebaliknya, Nahdliyin melakukannya Banyak pihak menekankan. Dalam hal ini, elite NU diharapkan mampu melakukannya memberikan pelatihan politik nahdliyin untuk selektif Pemilihan partai, yaitu. bukan pilihan emosional tapi pilihan rasional.

Tetapi jika kita mencoba mengikuti proses perubahan yang mengikuti perjalanan NU melalui sejarahnya yang berkelanjutan Untuk mengalami perubahan, harus dilihat dari latar belakangnya pengaturan politik setiap keputusan yang dibuat oleh elit politik dan mengapa apa sekarang Dalam hal ini, penulis mencoba menghilangkan stress Sejarah NU melewati tiga periode, itu jelas Perubahan paradigma politik NU dan polarisasi gerakan di setiap periode. Sekaligus menjelaskan stigma kontroversi tersebut membaca sebagai dinamis.

Yakni, gelombang internal NU adalah dinamika yang justru membuat NU semakin dinamis dan untuk eksis. Pertama, periode pertahanan reaktif (1926-1952), periode hal ini semakin menegaskan peran kiai atau keunggulan kiai.

Tipologi Gerakan berurusan dengan gerakan politik yang lebih religius. Sekarang lebih konfrontasi reaktif-defensif dengan gerakan kelompok modernis Reformasi perbaikan dalam hubungannya dengan kelompok adat (NU). Yang kedua adalah periode pertahanan politik (1952-1984). Pada periode ini elit NU melakukan "ijtihad politik". terjun ke politik praktis dan NU menjadi partai politik setelah berpisah dengan Masyumi (1952).

Partai NU berhasil yang ketiga datang dalam pemilu (1955) di bawah PNI dan Masyumi. Perjuangan NU di kancah politik melahirkan kader-kadernya seperti KH. Wahid Hasyim dan KH. Saefuddin Zuhri menteri agama "berguna" untuk melegitimasi sebuah ideology agamanya Tapi jika kita jujur tentang sejarah, terus-menerus Selama itu, aktivitas politik-keagamaan NU cukup terabaikan. Di dalam Tangan politisi NU bergabung dengan lebih banyak kekuatan NU sebuah kancah politik praktis yang emosional yang kerap melahirkan dinamika internal di dalam NU itu sendiri. Periode ketiga (1984-sekarang). Tipologi gerakan NU dimulai perubahan orientasi politik kembali ke garis pertempuran dengan keputusan Kongres untuk kembali ke Khittah pada tahun 1926 NU di Situbondo 1984.

Musim intelektual kiai ini berhasil memperkuat kekuatan negosiasi NU. Dalam dua musim sebelumnya, NU Yang terkena tidak diperhitungkan, meski mereka juga berkeringat deras membangun negara ini tetapi hampir tidak pernah mencicipi kue Kekuasaan, kecuali jabatan Menteri Agama. Fenomena lain Periode ini adalah munculnya pemuda NU yang eksis di Lane secara budaya, mereka kreatif dalam membawa ide-ide kritis untuk melahirkan dengan cara yang berbeda Wacana pembebasan pemikiran muda NU mencakup teologi Pembebasan, meninggalkan Islam ke Islam post-tradisional. Nanti Lahirnya ulama NU bergelut di dunia akademis dan birokrat. BAIK kali ini tidak bisa disebut grup Seorang tradisionalis lagi, tapi pasca-tradisionalis ransisi dari satu musim ke musim lainnya, Gerakan NU selalu mengalami perubahan, baik sikap maupun paradigma gerakan meliputi; gerakan politik agama, politik dan budaya serta gerakan

pemikiran yang umumnya liberal progresif. Hal ini justru membuat NU semakin kekinian dan dinamis. Pergeseran paradigma gerakan NU terlihat jelas. Kematangan elit NU untuk beradaptasi dengan perubahan apapun, dan pada tataran pemikiran, kebijakan agama dan politik. Paradigma politik NU berubah total setelah kembali ke Khittah pada tahun 1926, yaitu perubahan perilaku politik NU dari politik praktis ke politik moral bangsa. Gerakan NU melihat penyimpangan dari dominasi kiai, kiai politisi hingga kiai intelektual.

Wajah NU setelah kembali Khittah 1926 dan NU setelah Gus Mayor. Ini terlihat berbeda. Kalau dulu NU adalah partai politik, sekarang NU berusaha tampil identitasnya sebagai organisasi politik keagamaan juga mencoba menarik garis antara NU dan partai PKB PBNU didirikan di bawah Gus Dur.

Sikap NU juga berdampak perilaku politik, NU berusaha meminimalisir konflik dan dinamika batin. melihat CH Era Hasyim Muzad Perubahan posisi politik NU yang jelas sebagai implementasi khittah NU 1926, d. H. NU tidak bermain politik praktis untuk dirinya sendiri. Kepentingan kuat, tapi NU harus berpolitik moral-nasional. Artinya, jika ada sesuatu yang berbahaya Demi kelangsungan negara, NU harus turun tangan seperti penanganan terorisme dan radikalisme agama. jika begitu, karenanya kesan kontroversial dari perilaku politik NU menjadi tidak berarti. Syamsul Ma'arif berharap pada NU Meninggalkan kebiasaan kontroversial juga utopis, jika Sengketa yang dimaksud adalah perselisihan internal SEKARANG. Karena sudah menjadi "tradisi" dari berbagai sudut pandang di NU.

Politik sebagai pengaruh fleksibilitas dalam memahami Fiqh Politik. Tapi tidak peduli seberapa besar konflik atau pertengkaran itu menghilang setelah rekonsiliasi internal. Meskipun berharap untuk mengatur ulang atau juga memperbaharui hubungan NU dengan kelompok modernis apa-apa, apalagi kalau mendengar kejatuhan Gus Dur. poros tengah yang didominasi oleh kelompok modernis yang awalnya mendukung penggantinya berhasil dalam waktu singkat menjatuhkan Gus Durin yang dijanjikan sebelumnya. Karena Sulit membuat Nahdliyy berkoalisi dengan kaum modernis. Apalagi saat melihat ke belakang

Pasang surut NU dan pil pahit keterpinggiran NU di arena Politik tidak terlepas dari perlakuan kelompok modernis Masyumi atau poros tengah.

Selanjutnya ingin NU menarik garis dengan partai yang ada, para penulis Saya kira sudah tepat karena NU merupakan aset bangsa yang perlu diperkuat. Hal ini juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia nahdliyin Kami juga sependapat dengan Syamsul Ma'arif bahwa itu penting Ke depan, kebijakan NU akan segera diserahkan kepada kadernya NU ke kancah politik praktis. Karena kader muda NU mulai menunjukkan bahwa ada yang memilih jalur politik-struktural, ada pula yang memilih jalur kultural.

Barisan pemuda NU Budaya ini merupakan aset yang cukup potensial untuk dikembangkan sekarang. Mereka cukup sibuk melakukan pekerjaan politik seperti mis Membantu anak jalanan, pendidikan politik, pemberdayaan seorang petani yang bekerja. NU bisa membangun kemandirian di pundaknya masyarakat dan menjadi pionir dalam penguatan post-civil society Gus Dur adalah negara.

Pengunduran diri Gus Dur dari kursi kekuasaan tepat adalah kemenangan budaya NU. NU bertujuan mengembangkan paradigma politik baru nasionalisme moral untuk menjaga keutuhan bangsa cukup bijak, seperti pelaksanaan Khittah NU 1926 dengan cara diresmikan Perbatasan antara gerakan budaya NU dan politik praktis. Upaya NU memberdayakan masyarakat budaya ini didedikasikan untuk memperkuat masyarakat sipil NU baik sebagai jam'iyahna (organisasi) maupun sebagai jama'ahna (komunitas) mempromosikan pembentukan negara-bangsa yang lebih baik hati, lebih religius, damai dan demokratis. Adapun ciri-ciri utama dan gagasan dasar perjuangan NU, merumuskan khittah Nahdlatul Ulama yang merupakan Mukhtamar NU merumuskan definisi yang:

1. Khittah Nahdlatul Ulama adalah dasar pemikiran, berperilaku dan bertindak anggota Nahdlatul Ulama yang harus tercermin dalam perilaku individu baik dalam organisasi maupun dalam setiap proses pengambilan keputusan Keputusan.
2. Landasannya ada pada paham Ahlussunah wal-Jama'ah ditentukan oleh kondisi social Indonesia yang juga mencakup dasar-dasar agama secara social



3. Khittah Nahdlatul Ulama juga digali oleh dinas piloting sejarah kehormatannya dari masa ke masa.<sup>63</sup>

Meski keputusan tersebut melalui proses yang panjang Kongres NU ke-27 yang resmi meninggalkan arena politik praktis atau kembali ke Khittah 1926 ternyata masih menghadapi kendala, karena masih banyak warga NU yang secara terang-terangan maupun terselubung tidak setuju. Kembalinya NU ke Khittah dan ormas politik-keagamaan bukan sekadar memenuhi tuntutan politik. kemudian, tetapi juga kesadaran konkrit NU sejak saat itu lahir pada tahun 1926, pada dasarnya adalah sebuah organisasi yang bekerja di bidang ini Agama, politik, dakwah dan pendidikan.

Dengan kembalinya NU menjadi organisasi politik keagamaan, yah apa yang bisa dilakukan elit Fokuskan energi dan semangat mereka pada pembangunan dan Memberdayakan masyarakat melalui program-program yang terorganisir matang dan mencakup wilayah yang luas. Dalam hal ini TIDAK dikatakan telah membalikkan keadaan di panggung dunia dari politik praktis ke politik praktis, dari politik prestise otoritas keagamaan dalam masyarakat.

Bahrul Ulum melakukan pose tawazzun (seimbang), tawassuth (tengah), i'tidal (lurus), tasamuh (Toleransi) dan Amar makruf Nahi mungkar menjelaskan berdasarkan ajaran tersebut (ahlussunnah wal jamah). NU lahir dari sikap ini masa depan sebagai model untuk semua kelompok Sekaligus menyatukan masyarakat madani dan pemberdayaan Khittah NU 1926 dikaji mengingat benturan wacana selalu mewarnai ledakan debat yang diprakarsai para pemikir Islam mencari bentuk-bentuk Islam Indonesia Penguatan kesadaran identitas dalam wacana masyarakat sipil, yaitu mengambil alih untuk memenuhi istilah ini dari berbagai sumber yang memiliki tradisi Islam Indonesia yang kaya.

Berdasarkan bukti dari sejarah politik Indonesia, Era awal pemerintahan Orde Baru menunjukkan kebijakan ini restrukturisasi politiknya melemahkan kekuatan politik Islam, di sisi lain, justru menawarkan peluang untuk berkembang kekuatan Islam yang tidak resmi. Dalam keadaan ini As'ad menganalisisnya sebagai fenomena baru yang ditunjukkan oleh beberapa politisi lebih untuk memperkuat

---

<sup>63</sup> bid, h. 92.

posisi negara dan sangat sedikit yang mengarah pada penguatan posisi masyarakat.

Implikasi, Keterlibatan pemerintah dalam pengendalian pasukan eksis dalam masyarakat, termasuk kekuasaan bermotivasi agama, sulit untuk menghindari.<sup>64</sup>

Meskipun Dawam Rahardjo melihat situasi ini terutama bagi kalangan intelektual Umat Islam memiliki pengaruh buruk dalam proses demokratisasi di era ini Pada 1990-an, kaum intelektual mulai mengembangkan wacana sipil Masyarakat atau masyarakat sipil sebagai cermin frustrasi social tentang proses demokratisasi diterbitkan pada saat itu sebagai bentuk perlawanan yang mengarah pada penguatan masyarakat sipil.<sup>65</sup>

Lemahnya masyarakat sipil dalam hubungannya dengan Negara itu menjadi preseden buruk bagi proses demokratisasi itu sendiri. Efek pada organisasi Islam diharapkan terlibat dalam penguatan masyarakat sipil, tetapi sebenarnya tidak dalam proses konversi, misalnya, NU tidak berpengalaman sebuah proses perubahan dalam visi politiknya yang mendalam Menunggu perubahan politik. Selain itu, mereka juga tidak dapat berubah sebagai entitas pemberi ketika berbicara tentang nuansa penguatan masyarakat sipil kekuasaan negara Dalam hal ini, Abdurrahman Wahid ingin ormas Islam seperti NU berubah Fokus pada penguatan masyarakat sipil.<sup>66</sup>

Di kalangan intelektual muslim Indonesia yang berjuang Wacana ini dapat dikatakan mewakili gerakan keagamaannya yang sarat akan muatan politis dan ideologis, maka tak heran Hikam selalu menuntut NU sebagai masyarakat madani karena dengan konsep masyarakat madani Tradisi yang dianut NU, bahkan

---

<sup>64</sup> 1 As'ad, Teologi Humanistik: *Kajian tentang Wacana Islam Pembebas di Kalangan Pemikir Muslim Indonesia Masa Orde Baru*, (Surabaya: Tesis PPs Sunan Ampel, 2001), h. 74.

<sup>65</sup> M. Dawam Rahardjo, *Masyarakat Madani: Agama, Kelas Menengah dan Perubahan Politik*, (Jakarta: LP3ES, 1999), h. 241

<sup>66</sup> Abdurrahman Wahid, "*Islam dan Pemberdayaan Civil Society*", seperti dikutip AS Hikam, "*Wacana Intelektual tentang Civil Society di Indonesia*", dalam *Paramadina* Vol.1, No.2 (1999), h. 43-44.

Khittah NU dibaca sebagai bentuk gerakan budaya sebagai bagian dari penguatan masyarakat sipil.<sup>67</sup>

Kesadaran ini akan menguat munculnya analisis oleh beberapa sarjana dan pengamat mengidentifikasi NU sebagai gerakan yang mengedepankan masyarakat sipil, seperti Pengarang: Douglas E. Remage<sup>68</sup> dan Daniel Dhakidae<sup>69</sup> yang menyebut NU sebagai benteng terakhir masyarakat sipil Indonesia. Fajrul Falakh mencoba hal serupa secara tertulis Menghubungkan NU dengan cita-cita masyarakat madani jatuh mendukung tesis dengan mengacu pada hasil kongres NU di Situbondo dan Cipasungi membacakan ikhtisar NU dari cita-cita politik NU. Dalam artikel itu dia menekankan Civil society sebagai cita-cita politik NU.

Dia juga mengkritik Analisis oleh Kuntowijoyo, Kenneth Ward dan Ben Anderson Masing-masing menyebut NU sebagai subyek, oportunist dan Residence dan bahkan NU disebut saja lebih diminati atau murni masalah agama dan mencapai sukses besar melestarikan identitas mereka Kaitkan masyarakat sipil dengan gerakan politik Upaya NU memperkuat Khittah NU merupakan salah satu langkah

NU proaktif dalam merombak cita-cita. Dalam hal itu, Muhammad Fajrul Falakh mengatakan tentang cita-cita Kebijakan NU berdasarkan hasil rumusan kongres NU sejak tahun 1984 di Situbondo yang cukup monumental, yaitu, pemulihan NU ke asas pendiriannya tahun 1926 sebagai sebuah organisasi Kebijakan agama sebagai cita-cita NU sejak awal.

Tentu saja dengan interpretasinya sendiri atas Khittah 1926, Falaakh mencoba menyesuaikannya dengan cita-cita masyarakat sipil. Ia menyebutkan empat sikap sosial NU (al-tawasuth wa ali'tidal, tasamuh, tawasun dan Amar ma'ruf Nahi mungkar). mewakili posisi politik NU.

<sup>67</sup> Muhammad AS.Hikam, “*Khittah dan Penguatan Civil Society di Indonesia: Sebuah kajian Historis Struktural atas NU sejak 1984*”, dalam Ellayasa KH. Dharwis, Gus Dur, NU dan Masyarakat Sipil, (Yogyakarta: LKiS, 1997), h. 133-163.

<sup>68</sup> Lihat, Douglas E. Remage, “*Democraton, Religios Tolerance, and Pancasila: The Political Thought of Abdurrahman Wahid*”, dalam Greg Barton dan Greg Fealy (eds.). *Nahdlatul Ulama, Traditional Islam, and Modernity in Indonesia* (Clayton: Monash Asia Institute, 1996), h. 254 dan 227.

<sup>69</sup> Lihat tulisan Dhaniel Dhakidae, “*Langkah Non-Politik dari Politik Nahdlatul Ulama*”, dalam Ellayasa KH. Dharwis (ed), *Gus Dur, NU dan Masyarakat Sipil*, (Yogyakarta: LKiS, 1997), h. 125-131.

Posisi politik NU selalu demikian Warna dan pengaruh pada aktivitas politik, misal Memahami Amar ma'ruf Nahi sebagai bentuk konsep monastic sepenuhnya menyadari tanggung jawab. Berdasarkan nilai-nilai tersebut, NU mengembangkan gerakan tersebut Kebijakan keagamaan NU, artinya nilai-nilai tersebut terinternalisasi dalam gerakan politik-keagamaan NU (gerakan dakwah budaya), termasuk upaya penguatan masyarakat sipil itu sendiri

